



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DAMPAK KENAIKAN BBM

**BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme
dan Neokolonialisme**
S. Aminah

**Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi
dan Pergeseran Peran Perempuan**
Bagong Suyanto

**Ancaman Meluasnya Kemiskinan
akibat Kenaikan BBM**
Karnaji

**Kebijakan Kesehatan di Indonesia :
Antara Market Approach dan Social Equity Model
(Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)**
Adri Patton

**Personal Influence and Power Distance:
Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising
Public Relations Practices in Asian Countries**
Ratih Puspa

**Analisis Daya Dukung Gua
untuk Pengembangan Ekowisata
(Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)**
Chafid Fandeli, Tjahyo Nugroho Adji

Pembangunan Ekowisata di Indonesia
Nur Emma Suriani, Nurdin Razak

**Resensi Buku
Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku**
Doddy S. Singgih

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Apabila membicarakan kenaikan BBM, banyak pakar diberbagai forum diskusi telah menjelaskan dan menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan sangat multidimensional bahkan kehadiran kenaikan BBM dapat berpengaruh di kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, hukum, sosial. Bahkan jauh sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan para analis ekonomi meramalkan ambruknya perekonomian masyarakat hanya tinggal menunggu waktu saja.

Efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM di pasaran bagaimana pun membuat masyarakat miskin makin terhimpit tanpa bisa melakukan reserve untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai merambat naik, sementara perkembangan sektor riil justru tengah lesu, maka yang terjadi kemudian adalah beban baru yang memberatkan keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin yang sehari-harinya sudah terbiasa hidup pas-pasan. Alih-alih kebijakan pencabutan subsidi BBM bakal membuat jumlah penduduk miskin berkurang seperti diinginkan pemerintah, yang terjadi di lapangan pasca kenaikan harga BBM adalah beban baru yang mesti ditanggung penduduk miskin menjadi makin berat. Dalam kenyataan tidak jarang terjadi penduduk yang semula miskin menjadi makin miskin dan berkekurangan karena mereka makin tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang makin berat.

Seperti biasanya, dengan dalih untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat –karena harga minyak dunia mulai melambung di atas ambang psikologis– di satu sisi dan membantu masyarakat miskin di sisi lain, pemerintah mulai mengeluarkan jurusnya untuk meredam kemarahan masyarakat miskin dengan program BLT (bantuan langsung tunai) hasil dari dana kompensasi kenaikan BBM. Meskipun hanya Rp 300.000 per tiga bulan, untuk mengentas masyarakat miskin tentu saja dana sebesar itu belum cukup membantu meringankan beban masyarakat, karena bahan pokok sudah mulai naik lebih dahulu bahkan sebelum pengumuman kenaikan BBM disosialisasikan oleh pemerintah. Sekali lagi program-program yang digulirkan pemerintah acapkali bersifat karitatif dan tambal sulam sehingga tidak sampai menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya.

Berbagai artikel, serta hasil penelitian yang diolah redaksi tidak lain adalah berbagai efek yang terjadi semenjak digulirkannya kebijakan kenaikan BBM, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: pada lingkup politik S. Aminah membahas BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme; kemudian Bagong Suyanto mengulas tentang Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan; Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM oleh Karnaji; Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Antara Market Approach dan Social Equity Model dipaparkan Adri Patton; Ratih Puspa menyajikan Personal Influence and Power Distance: Acknowledging Local Culture Influence In Conceptualising Public Relations Practices In Asian Countries; Analisis Daya Dukung Gua untuk

Pengembangan Ekowisata oleh Chafid Fandeli dan Tjahyo Nugroho Adji; Nur Emma Suriani dan Nurdin Razak membahas tentang Pembangunan Ekowisata di Indonesia serta resensi buku Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku oleh Doddy Sumbodo Singgih.

Harapan redaksi semoga keberadaan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi perbaikan proses pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2006:
Agenda Permasalahan Tahun 2006

BBM DALAM PERGULATAN SKENARIO NEOLIBERALISME DAN NEOKOLONIALISME

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme

S. Aminah

1

Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan

Bagong Suyanto

15

Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM

Karnaji

27

Kebijakan Kesehatan di Indonesia :

Antara Market Approach dan Social Equity Model (Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)

Adri Patton

41

Personal Influence and Power Distance:

Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising Public Relations Practices in Asian Countries

Ratih Puspa

57

Analisis Daya Dukung Gua untuk Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)

Chafid Fandeli & Tjahyo Nugroho Adji

67

Pembangunan Ekowisata di Indonesia

Nur Emma Suriani & Nurdin Razak

81

Resensi Buku

Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku

Doddy S. Singgih

95

BBM DALAM PERGULATAN SKENARIO NEOLIBERALISME DAN NEOKOLONIALISME

S. Aminah

Dosen Jurusan Ilmu Politik Fisip Unair

Abstract

In liberalism logic, growth of fast economics can be reached without the roles of state in economics. Abolition policy of fossil fuel subsidy which has caused the cost of fossil fuel arise is not self supporting policy. The main goal of neoliberal movement is to dominate economy system in developing countries, hence target of founding of neoliberal institutions like World Bank and IMF also can be interpreted as a systematic process conducted by rich industrial nations to institutionalize and change the center-suburban economic pattern from bilateral to multilaterally. The increase of fossil fuel indicates that neoliberalism is rarely conducted in Indonesia.

Keywords: neoliberal, fossil fuel subsidy

Neoliberalisme telah menjadi salah satu ideologi yang paling berbahaya dalam abad 21 ini, karena sifatnya yang mudah menyebar dan merasuki pikiran the ruling class yang tergoda untuk menerapkannya karena menjanjikan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Neoliberalisme juga mempengaruhi semua lini kehidupan sosial manusia. Ada rambu-rambu yang sudah dibuat bagi negara yang kurang cermat menginterpretasi isme ini, karena sesungguhnya neoliberalisme bukan sekadar pasar bebas (mengandung arti arti hukum kekuatan pasar tidak hanya terbatas meliputi pada soal produksi, distribusi dan konsumsi) saja melainkan seluruh kehidupan manusia harus tunduk dan mengacu kepada hukum pasar, artinya, semua relasi sosial dan politik manusia adalah sebagai transaksi ekonomi. Apabila

pasar besar dipahami makna filosofinya secara mendalam, maka pasar bebas yang salah arah akan segera memunculkan diskriminasi terhadap mereka yang tidak mampu menjual dan yang tidak mampu membeli. Intinya, kecerobohan dalam implementasi membuahkan kehancuran kehidupan sebagian besar rakyat. Sifatnya yang mudah menyebar ke semua penjuru dunia karena iming-iming keunggulan sifat yang membawa kemakmuran. Dengan dukungan dari ekonomi global, dan juga oleh kuasanya untuk mengartikan kembali karakteristik dari politik itu sendiri maka tidak pelak neoliberalisme diminati sebagian besar the ruling class negara Dunia Ketiga yang kondisi sosial negaranya masih jauh dari kemakmuran.

Fundamentalisme pasar bebas bukan sekadar idealisme yang demokratis yang sekarang ini menjadi daya penggerak

ekonomi dan politik dunia, melainkan sebagai suatu ideologi pasar yang digerakkan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dan karena kemampuannya mereproduksi dirinya hingga mencapai keberhasilan seperti apa adanya sekarang. Liberalisme ini memiliki implikasi yang sangat jauh dan mendalam di bidang ekonomi politik dan keadilan sosial dalam tata kemasyarakatan.

Neoliberalisme dan petaka Ekonomi Indonesia

Neoliberalisme versi Indonesia tidak seperti yang terjadi di negara-negara Barat sebagai negara kapitalis mapan. Awalnya, negara ini miskin disebabkan oleh tidak adanya sebagian besar atribut industrialisasi, kurangnya modal, keahlian manajerial, infrastruktur, dan stabilitas politik. Kemudian tawaran Barat datang dengan formula modernisasi untuk mengejar ketertinggalan negara ini dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Semua sektor kehidupan tidak ada yang tak tersentuh modernisasi, termasuk di pedesaan, pemerintah melakukan revolusi hijau.

Pemerintah tidak pernah eksplisit menentang Bank Dunia maupun IMF, tetapi Inpres merupakan bentuk tiadanya kekuatan tawar-menawar dalam kebijakan ekonomi neoliberalisme. Negara kurang tepat alih-alih dalam peran ekonomi dan politiknya. Negara bahkan terlanjur dalam membantu menghapus hambatan-hambatan ideologi bagi tampilnya sektor swasta untuk menghidupi kelas kapitalis. Goncangan anjloknya harga minyak, atau anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebenarnya bukan masalah baru di Republik ini. Anggaran negara

mengalami defisit sekitar 14 % dan tingkat inflasi mencapai 635% tahun 1996-sebagai angka fantastik dari kebangkrutan negara. Dalam kurun waktu 1960-1963, perekonomian mengalami stagnasi, pertumbuhan ekonomi nol Pemerintah Soeharto pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dengan dipimpin teknokrat liberal bekerja keras dengan menggelar program pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi politik. (Hill, 2000). Mengapa negara ini mengikuti anjuran ekonom liberal? Janji mereka adalah neoliberalisme akan membawa kemakmuran global, dan Stanley Aronowitz memberikan pembenarannya (dikutip oleh Henry A. Giroux, 2004) bahwa doktrin ekonomi neoliberal memproklamkan keunggulan pasar bebas sampai akhirnya ideologi ini melintas batas-batas nasional. Negara Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan menerapkan pembangunan melalui aplikasi konsep industrialisasi yang berbasis kapitalisme, kemudian kebijakan ini menjadi senjata andalan pemerintah. Industrialisasi membutuhkan intervensi negara pada kehidupan ekonomi yang pada akhirnya sampai pada suatu titik yang mengancam kemerdekaan individu, karena sifat campur tangan dan peranan pemerintah yang besar memaksakan kesepakatan-kesepakatan substansial dan meningkatkan peluang untuk konsentrasi kekuasaan.

Pada tahun 1947, Hayek mengadakan konferensi tertutup di Mount Pelerin Swiss. Mereka bersatu untuk mencari jalan keluar atas masalah yang menimpa kolektivisme yang terjadi di Eropa. Pada akhirnya, konferensi itu menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah kelompok yang bernama The Mont Pelerin Society. Kemudian tahun 1950,

Hayek hijrah ke Amerika Serikat bergabung menjadi anggota staf akademis di Universitas Chicago. Para ekonom di Universitas Chicago seperti Milton Friedman, George Stigler, dan Gary Becker sedang menggodok pemikiran tentang pasar bebas. Friedman dikenal sebagai penentang keras campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, gagasan dari ekonom John M. Keynes. Argumentasi Friedman adalah kebijakan stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran dengan kebijakan investasi untuk mengungkit belanja masyarakat, justru dapat membangkrutkan masyarakat, karena hal itu berarti kontrol pemerintah atas peredaran uang. Menurutnya, kehidupan ekonomi masyarakat bisa berlangsung baik apabila campur tangan pemerintah dalam bentuk apa pun tidak ada, sedangkan soal insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Tingkat pengangguran tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah tetapi diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja bebas. Friedman menyatakan bahwa hanya ada satu tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan pada akumulasi laba.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah mulai tahun 1980-an sesungguhnya merupakan buah dari arahan orde neoliberalisme. Tetapi pemerintah atau the ruling class tidak bersedia untuk bersikap jujur dan terbuka kepada rakyatnya tentang isme yang dipakai dalam menjalankan roda pembangunan ekonominya, karena isme itu rohnya adalah kapitalisme. Kesangsian rakyat sudah nampak dengan kebijakan yang diambil pemerintah, terutama saat

ada kejutan minyak di awal tahun 1982 dengan anjloknya harga minyak dari sekitar US\$35 perbarel menjadi US\$28 perbarel di tahun 1986, dan semakin anjlok pada Agustus 1986 dengan harga US\$9,38 perbarel. (Hiarej, 2005). Bayangan krisis ekonomi sudah ada di depan mata, kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa sudah muncul dan menandai konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Tetapi begitu dengan mudah dieliminasi oleh pemerintah dengan kebijakan depolitisasi politik.

Neoliberalisme bukan hal baru dalam ekonomi politik. Kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi BBM merupakan dua persoalan ekonomi politik yang terkait dengan eksistensi negara ini yang sudah masuk dalam lingkaran kuasa neoliberalisme dan globalisasi. The ruling class tidak tega mengatakan di hadapan rakyatnya bahwa pencabutan subsidi karena "instruksi" yang harus dijalankan oleh pengikut orde neoliberalisme, menolak hukumnya haram. Inti dari persoalan itu menjadi penegas bahwa negara ini adalah tidak sekadar sebagai komprador kapitalisme internasional, kapitalisme negara, kapitalisme birokrasi yang gagal, tetapi juga sebagai negara sudah mengabaikan peranannya untuk membantu menyejahterakan sebagian terbesar rakyat yang ditimpa krisis sosial ekonomi berkelanjutan. Pemerintah dengan bahasa santun menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam mengelola aset ekonomi yang sudah mulai kewalahan dengan mengatakan bahwa privatisasi untuk efisiensi, ekonomi biaya tinggi harus diperangi. Kebijakan Inpres No.4 tahun 1985 adalah penyederhanaan tata niaga

perdagangan dalam dan luar negeri, serta peningkatan ekspor nonmigas dan di dalamnya ada privatisasi. Inpres itu sebagai bukti dari sikap setuju pemerintah untuk memangkas biaya pelabuhan ke kapal yang tinggi, dan Inpres tersebut juga dapat dimaknai sebagai pendekatan ekonomi teknis dalam memerangi korupsi aparat pemerintah khususnya instansi bea cukai dan perhubungan laut.

Lebih jauh lagi, kebijakan itu dikeluarkan pemerintah karena turunnya harga minyak bumi pada tahun 1983/1984 (sekitar US\$ 5 perbarel) dan tahun 1984 (US\$ 1 perbarel), dan akibat dari impotennya OPEC dalam menentukan harga minyak dan market share. Begitu juga Inpres No.5/1985 yang berisikan Instruksi Presiden kepada para menteri untuk menyederhanakan berbagai peraturan dan perizinan dalam lingkup departemen dan/atau badan-badan lain dari pejabat yang bersangkutan. Inpres ini merupakan perwujudan nyata dari suara rakyat yang menginginkan deregulasi. Inti dari Inpres-Inpres tersebut pada dasarnya adalah untuk menghemat anggaran belanja negara yang sebelumnya terus meningkat dan mengalir ke kalangan swasta. (Sjahrir, 1985). Masa-masa pertumbuhan ekonomi tinggi (1969-1981) dengan rata-rata pertumbuhan 6-7% mulai memperlihatkan turun tahun 1983/1984 karena berkurangnya ekspor nonmigas. Tahun 1983 terjadi devaluasi dari Rp625 per US\$ 1 menjadi Rp970 per US\$ sampai sekarang mata uang rupiah merost terhadap dollar US, Rp10.000 untuk US\$1. (Kompas, 15 November 2005).

Penghapusan berbagai aturan bagi operasi bisnis perdefinisi merupakan suatu langkah pemberian hak istimewa dan

kekuasaan yang begitu besar kepada para pemilik modal itu. Keluar-masuknya modal dengan bebas itu pada akhirnya menjadi senjata pamungkas yang secara gratis diberikan oleh pemerintahan suatu negara kepada para pemilik modal itu. Untuk menumpuk modal, mereka tidak lagi terikat aturan lokasi produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya. Dalam tata ekonomi neoliberal, pemilik modal dengan mudah dapat menolak tuntutan buruh maupun peraturan pemerintah, dengan cara memboikot penanaman modal ataupun dengan cara mengancam akan hengkang ke negara lainnya yang mempunyai syarat lebih lunak dan memberikan insentif akumulasi laba yang lebih cepat dan lebih tinggi. Terlihat dalam tahun 1990-an, deregulasi perbankan pun berakhir dengan likuidasi. Ini semua akibat dari faktor kapitalis internasional yang mudah berpindah dan dukungan hubungan negara dan modal yang berlandaskan koneksi politik menciptakan perilaku bisnis yang berisiko tinggi hasilnya adalah bencana sosial ekonomi politik. Negara cuma melindungi para kapitalis yang berpengaruh dari efek merusak yang ditimbulkan dari reformasi ekonomi. Negara menghambur-hamburkan monopoli, kontrak, konsesi, dan kredit.

Dalam sistem pasar diasumsikan bahwa kemungkinan penindasan dan konsentrasi kekuasaan bisa dihapus, dan dihapuskan kekuatan nirpolitik bisa mengimbangi otoritas politik yang sah. Dalam pembangunan yang menerapkan logika kapitalisme antagonis dan dengan sistem yang dibangun di atas maka akan terjadi terus reproduksi kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan yang terus menerus direproduksi akhirnya sampai

pada tahap krisis ekonomi berkepanjangan.

Pada awalnya, kesenjangan tersebut bermaksud di atasi, tetapi justru dengan kebijakan-kebijakan yang ekonomi pembangunan hanya menghasilkan realitas berupa krisis-krisis sosial kemasyarakatan baru yang terus bermunculan, termasuk kasus kebijakan mencabut subsidi BBM yang tidak bisa hanya dinalar dengan menggunakan logika neoliberalisme dan globalisasi. Semenjak jaman kemerdekaan, negeri ini selalu kerepotan bagaimana mengelola kekuasaan untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi itu retorika politik itu yang terus dikampanyekan oleh the ruling class demi perolehan legitimasi rakyat. Begitu mudahnya negeri republik ini mengikuti arus dogma-dogma ekonomi politik yang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tawarn berbagai isme untuk menjadi resep untuk menjalankan tata pemerintahan sudah diramalkan membuahkan ketertiban, keteraturan, dan kebahagiaan bagi rakyat dengan mudah diterima oleh the ruling class di Indonesia, hingga negeri ini tak kuasa lagi menghentikan langkah dari gerakan neoliberalisme, kapitalisme sampai perdagangan bebas, globalisasi, good governance. Formula-formula politik yang didikte Barat tersebut semuanya telah menghimpit kehidupan kelompok masyarakat miskin, baik yang di perkotaan maupun perdesaan.

Kenaikan harga BBM dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahun 2005 sebanyak dua kali, sungguh luar biasa. Ada apa dengan pemerintah ini. Ketika 1 Maret 2005, harga BBM naik sekitar 29% itu dianggap

angka wajar, tetapi dengan kenaikan sebesar 80% per 1 Oktober 2005 lalu menyisakan kepiluan yang besar karena berarti kesejahteraan sebagian rakyat di negeri ini semakin jauh dari kenyataan bahkan mustahil rakyat bisa menikmati hidup selayaknya. Alasan pencabutan pun muncul dengan hitungan-hitungan ekonomi politik yang canggih, di antaranya masyarakat dianggap boros menggunakan BBM, dan terbatasnya kemampuan uang dimiliki pemerintah dengan mengeluarkan uang sebanyak Rp70 Triliun.

Apakah hal ini sebagai alternatif untuk memecahkan masalah kemiskinan kebangkrutan ekonomi negara atau apa? Persoalan krisis ekonomi umumnya dan pencabutan subsidi BBM, khususnya tetap masih masih menyisakan peluang bagi reformasi pasar. Tetapi kalau krisis ini justru memperkuat permainan dari agen-agen internasional seperti IMF, dan Bank Dunia yang bekerja atas dasar neoliberalisme, maka rakyat miskin benar-benar menjadi makhluk miskin. Terlebih jima teknokrat liberal dan agen-agensya terus berusaha untuk menyudahi peranan negara dalam kegiatan ekonomi. Kalau sudah demikian, ke mana rakyat miskin mencari penghidupan?

Ada beberapa cara memandang kemiskinan, di antaranya adalah kemiskinan adalah sebagai suatu proses, sednagkan sebagian lagi memandang kemiskinan sebagai akibat dan fenomena dalam masyarakat. Dalam pandangan pertama, kemiskinan sebagai suatu proses artinya adalah kemiskinan mencerminkan kegagalan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada secara keseluruhan kepada masyarakat, dan hal ini dinamakan kemiskinan relatif atau struktural. Sedangkan kemiskinan sebagai suatu

akibat artinya kemiskinan terjadi karena kegagalan kelembagaan pasar bebas dalam mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat. Hal ini kemudian menghasilkan kemiskinan absolut. Dalam bahasa Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berbagai kebijakan sudah banyak dibuat oleh pemerintah dan negara-negara donor untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik yang berada dalam kategori kemiskinan absolut maupun relatif, termasuk upaya-upaya advokasi yang dikerjakan oleh non government organizations. Contoh-contohnya: secara umum, terdapat dua macam program bantuan bagi masyarakat miskin, yaitu program penyelamatan, dan program pemulihan. Program penyelamatan ekonomi masyarakat miskin bertujuan membantu masyarakat miskin dari kondisi krisis berat, seperti kehilangan pekerjaan yang berlanjut dengan dijualnya alat-alat kerja dan juga alat produksi yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam angka panjang, mereka terancam kelaparan dan kekurangan gizi. Di Indonesia program penyelamatan tergabung dalam skema program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Inti program JPS bermuatan nilai "charity" dengan pendekatan pemberian bantuan yang cepat dan tepat sasaran. Tujuannya adalah penyelamatan bagi sekelompok masyarakat agar terhindar dari bencana kelaparan, atau bahkan dari ancaman hilangnya generasi bangsa karena anak-anaknya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya, dan bersekolah.

Neoliberalisme secara historis sebagai penyempurnaan dari liberalisme klasik. Pertama kali neoliberalisme digagas

oleh Alexander Rustow pada awal 1930-an. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Verein für Sozialpolitik di Jerman pada September 1932, Rustow mengusulkan agar penyelenggaraan pasar bebas sebagaimana diajarkan liberalisme, disempurnakan dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Gagasan Rustow itu kemudian disempurnakan oleh Walter Eucken, Wilhem Ropke, dan Henry C. Simon dari Mahzab Chicago. Konsep para ekonom neoliberal tersisih oleh konsep ekonomi negara kesejahteraan, peranan ekonomi negara tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi mencakup kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, terutama untuk menjaga stabilitas moneter, menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja. Gagasan pokok neoliberalisme dikemas oleh Mazhab Freiburger dalam sebuah paket kebijakan ekonom yang dikenal sebagai paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme. Inti kebijakan ekonomi neoliberal menurut paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme adalah (i) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-semburna di pasar, (ii) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, dan (iii) pembentukan harga pasar tidak bersifat alami tetapi hasil dari penertiban pasar yang dilakukan negara melalui regulasi yang dibuat pemerintah dalam bentuk penerbitan peraturan atau undang-undang.

Dalam ordo neoliberalisme dengan konsep awal dari gagasan liberalisme diusung dalam konsep ekonomi politik ordo liberalisme klasik. Kaum liberalis klasik menolak konsepsi sejarah yang mengasumsikan perubahan sosial hanya

pada proses-proses perubahan ekonomi semata. Padahal proses perubahan sosial terbentuknya ekonomi politik kapitalisme maupun sosialisme-marxisme adalah sejarah institusional-ekonomi, di mana antara ekonomi dan infrastruktur sosial terjadi suatu hubungan sebab akibat yang timbal balik. Para pemikir liberalis klasik (pemikirannya menempatkan individualisme sebagai *methaphysical core*), menolak kinerja kapitalisme yang hanya diasalkan pada logika modal. Artinya, transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari relasi manusia, oleh karenanya hubungan-hubungan sosial manusia bukanlah untuk mengabdikan pada kapitalisme melainkan kapitalisme yang harus mengabdikan untuk membantu kebutuhan relasi sosial manusia agar berlangsung adil dan kompetitif. Artinya, neoliberalisme sebagai ideologi ekonomi yang menganjurkan persaingan bebas (*laissez faire*) yang pada praktiknya justru menguntungkan kalangan pemilik modal, dan dampaknya masyarakat kecil menjadi terpinggirkan.

Mengenai peranan regulasi negara, eucken mengemukakan empat hal untuk mendapat perhatian, yaitu (1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, (2) pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian pendapatan, (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya eksploitasi, dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan jumlah upah minimum.

Saat konsep ekonomi neoliberal diimplementasi sudah terlihat mengalami kekalahan dari konsep negara kesejahteraan. Peristiwa yang terjadi secara mencolok dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang

diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, dan dalam konferensi itu negara-negara anggota PBB cenderung memilih konsep negara kesejahteraan. Konferensi yang dihadiri oleh Keynes tersebut mencapai kesepakatan untuk mendirikan dua lembaga ekonomi dan keuangan dunia yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia/Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD).

Prestasi ekonomi yang dicapai Amerika dan Inggris pada 1975, seperti diutarakan oleh Nozick yang menyatakan kembali posisi kaum ultraminimalis, ultralibertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah *Reaganomics*. Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek Thatcherism. Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme menyebarkan gagasan yang dikaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda tetapi kesimpulannya akhirnya sama, yaitu intervensi negara perlu dikurangi, semakin kecil peranan negara semakin besar kebebasan individu-individu untuk berusaha.

Tetapi ketika neoliberalisme diterapkan di republik ini, dengan cara parsial, mungkin malu-malu, hasilnya adalah tidak jelas antara. Perhatikan saja kebijakan politik yang dibuat the ruling class dalam pembangunan ini mulai dari pengurangan subsidi, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semuanya langsung berkaitan dengan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal. Penerapan

neoliberalisme di Indonesia sejak 1980-an, yang ditandai dengan dilakukannya kampanye besar deregulasi dan debirokratisasi pada pertengahan 1984 sampai 1985, lalu berlanjut dengan liberalisasi sektor keuangan 1987, dan privatisasi BUMN pada awal 1990-an memasuki pascareformasi 1998 pada akhirnya semua aset BUMN sudah berpindah tangan ke asing.

Singkatnya, neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Bila ditelusuri sejarah neoliberalisme di Indonesia menjadi sangat signifikan pada saat ada krisis moneter mulai paruh 1997 dengan menyeret Dana Moneter Internasional (IMF) dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah. Mulai saat itu secara resmi negara Indonesia menerapkan neoliberalisme sebagai jalan baru dalam mengelola ekonomi Indonesia. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter. Sedangkan Bank Dunia, berfungsi sebagai bank internasional yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan

pinjaman kepada negara-negara yang menjadi anggotanya.

Terbukti bahwa keunggulan konsep ekonomi negara kesejahteraan terhadap neoliberalisme tidak bertahan lama. Tahun 1979, Margaret Thatcher terpilih sebagai PM Inggris, dan tahun 1980, Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden AS. Kedua tokoh ini sangat antusias memperjuangkan pasar bebas, melakukan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada pihak swasta, serta mengintrakkan sejumlah fungsi negara. Sejak itu, neoliberalisme disebarkan seperti virus ke seluruh dunia untuk mendongkrak kesejahteraan anggota masyarakat. Kalau pemerintah Inggris berhasil melakukan privatisasi seluruh BUMN mereka. Indonesia, khususnya, dan negara-negara Amerika Latin gagal, dan justru melahirkan krisis. Dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS, dan Bank Dunia, IMF bersepakat meluncurkan paket kebijakan ekonomi neoliberal (lebih populer dengan nama Kebijakan Konsensus Washington) yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi pelaksanaan empat kebijakan, yaitu (i) kebijakan anggaran ketat, (ii) liberalisasi sektor keuangan, (iii) liberalisasi sektor perdagangan, dan (iv) privatisasi BUMN.

Menurut Stiglitz, kelemahan mendasar agenda-agenda ekonomi neoliberal terletak pada pemujaannya yang sangat berlebihan terhadap peranan pasar. Bagi Stiglitz, pasar hanyalah salah satu alat, bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan perekonomian. Sebab itu,

peningkatan peranan pasar dalam penyelenggaraan ekonomi negara-negara miskin, lebih-lebih yang tengah dilanda krisis, dapat mengundang bahaya. Menjadikan pasar sebagai satu-satunya alat, lebih-lebih menjadikannya sebagai tujuan itu sendiri, sama artinya dengan memporakporandakan pondasi integrasi sosial dan menjerumuskan perekonomian negara-negara miskin yang sedang dilanda krisis menuju kehancuran. Dalam proses pemberdayaan, penguatan, penyadaran, dan sebagainya, dalam perjalanannya anggota masyarakat yang sudah terjerebab dalam dunia kemiskinan menjadi semakin sulit keluar dari dunia kemiskinan. Hal ini memnandakan bahwa ada skenario kemiskinan.

Kemiskinan yang diakibatkan neoliberalisme semakin mempertajam kesenjangan dan kenaikan BBM, tidak lain adalah program pemerintahan dari negara yang berperan sebagai komprador imperialis yang sudah menyetujui semua bentuk kesepakatan melaksanakan program-program neoliberalisme. Pemerintahan saat ini semakin memperlihatkan keberpihakannya dengan negara-negara imperialis.

Indonesia dalam Skenario Liberalisme

Pada awalnya dipercaya bahwa kontribusi peranan negara secara kuantitatif bisa menggenjot speruh GNP. Ini terjadi di Jerman, Perancis, dan Italia. Dengan pengalaman depresi ekonomi pada dekade 1930-an, keyakinan itu semakin bertambah besar dan kuat sehingga para ahli ekonomi politik jaman itu seperti Keynes dan Stiglitz menyarankan kepada negara-negara yang memiliki masalah dalam ekonomi untuk

mengundang negara dalam khidupan ekonomi. (Keynes, 1953 dan Stiglitz, 1989). Dengan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tinggi keterkaitan ekonomi dengan aspek-aspek kehidupan lain maka kehadiran peranan negara dalam bidang ekonomi adalah keharusan. Peningkatan kehidupan ekonomi anggota masyarakat dan pelaku-pelaku ekonomi individu tidak lagi tergantung pada peranan pasar dan organisasi ekonomi swasta. Selain itu, ada kecenderungan bahwa kekuatan pasar tidak bisa menyelesaikan persoalan sektor ekonomi. Peranan negara muncul dalam berbagai bentuk, seperti stabilisator sistem ekonomi, alokasi dan distribusi sumber daya termasuk produksi dan konsumsi. Keterlibatan langsung negara dalam kegiatan ekonomi diyakini oleh ahli ekonomi kesejahteraan bahwa andil negara dalam kegiatan ekonomi semata-mata untuk menghindari dampak eksternal, terutama yang terkait dengan dampak sampingan dari pengelolaan lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Sehingga kekuatan ekonomi negara lenih besar untuk melakukan usaha ekonomi pada skala besar bagi penyediaan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan, dan pendidikan. Dengan pertimbangan, skala usaha dan efisiensi maka negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat bisa lebih cepat dan murah menikmati basrang dan jasa ritu. Kebijakan-kebijakan yang didorong oleh kaum neoliberal secara umum, meliputi kebijakan penghapusan subsidi, deregulasi, privatsai, liberalisasi sektor keungan, perdagangan bebas, gerakan modal bebas, dan investasi habis. Dukungan dari para ekonom neoliberal juga

menawarkan apa yang disebut dengan *structural adjustment program*, yaitu berbagai bentuk bantuan pemikiran, konsep, dan regulasi. Kebijakan-kebijakan ini secara bertahap akan mendorong penurunan peran pemerintah, berlangsungnya privatisasi besar-besaran akan mendorong penurunan peran pemerintah, berlangsungnya privatisasi besar-besaran atas perusahaan negara dan pemotongan besra-besaran untuk kebutuhan publik seperti kesehatan, dan pendidikan. Realitasnya perlu dicermati lebih kritis dan seksama.

Dengan memahami keterkaitan kebijakan penghapusan subsidi (termasuk BBM) dengan rencana privatisasi, dan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, dapat diketahui bahwa penghapusan subsidi pada dasarnya adalah salah satu komponen saja apa saja dari suatu proses transformasi besar-besaran menuju penyelenggaraan sistem ekonomi neoliberal. Dengan demikian, munculnya kontroversi kenaikan BBM yang terjadi belakangan sesungguhnya tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan teknis semata; sekadar masalah penyesuaian harga dengan harga pasar, penentuan jumlah kenaikan dan waktu kenaikannya, atau penyaluran dana kompensasi subsidi BBM kepada kaum miskin. Masalah kenaikan harga BBM berakar jauh di dalam pendekatan dan orientasi pengelolaan ekonomi Indonesia yang sedang bergeser mengikuti jalan neoliberalisme. Artinya adalah sektor ekonomi menjadi terpolitisasi.

Dari pengalaman sejarah negara-negara industri peranan negara berkurang secara perlahan tetapi pasti dalam kehidupan ekonomi seiring dengan kemajuan perekonomian, dan akibat dari

tumbuhnya sektor ekonomi yang terpolitisasi oleh negara dan aparatnya. (Kunio, 1990). Peter Drucker (1990) melihat kenyataan bahwa negarasudah idak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuatan, karena pusat kekuatan ekonomi dan politik sudah terdiferensiasi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik. Kenyataan baru itu menuntut pola kepemimpinan dan suasana politik yang bisa mendukung keberlanjutan pembangunan. Meski negara dipandang oleh Adam Smith mapu melakukan kegiatan ekonomi secara langsung seperti halnya perusahaan swasta, tetapi ini tentu tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai organisasi ekonomi negara, terus merosotnya aset, dan karena ia milik negara maka dengan mudah aset BUMN digero-goti oleh aparat-aparat negara. Ini erjadi pada BUMN di bidang perkebunan, perhotelan, perikanan, industri, dan sebagainya yang pada akhirnya membawa bangkrut BUMN dan negara ini. Para ekonom aliran lberal seperti Herbert Spencer, Hayek (ekonomi neoklasik) menyangsikan peranan negara dalam kehidupan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi yang mengandalkan kekuatan pasar, tidak pantas negara ada di dalamnya. Hayek khususnya menolak keras keterlibatan negara dalam ekonomi. Hal ini melahirkan monopoli-monopoli negara pada gilirannya.

Paul Baran (1957) sebagai ekonomi radial menekankan bahwa tekanan kolonialisme menyebabkan peran pengusaha nasional di negara-negara bekas jajahan tidak lebih dari komprador perusahaan asing. Pendapat yang menjelaskan hubungan antagonis anatara perusahaan nasional dengan perusahaan

multinasional dikembangkan dalam analisis kritis oleh penganut teori dependensia. Menurut teori dependensia, dengan berakhirnya masa kolonialisme maka hubungan antagonis terus berlanjut anatar kelompok negara maju dan negara berkembang.

Penutup

Ekonomi politik yang berorientasi liberal menetapkan bahwa tugas negara adalah sebatas pemeliharaan keteraturan kehidupan masyarakat, perlindungan hukum, dan pembelaan terhadap ancaman luar. Menurut teori ekonomi politik ini, negara diadakan dan diselenggarakan sekadar untuk melindungi tindakan kebebasan warga negara, dan menjamin ruang kebebasan bagi warga negaranya, dengan syarat tidak mencampuri tindakan yang dilakukan warga negara. Dikhawatirkan dengan peranan negara yang besar bisa membunuh kebebasan individual, menimbulkan kekacauan politik, menghamburkan sumber daya, serta meningkatkan ketidakefisienan ekonomi. Negara hanya dibutuhkan peranannya untuk menjamin hak milik dan tetap memberikan ruang kebebasan beraktivitas warga negaranya.

Dalam logika liberalisme, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dicapai dengan tidak adanya peranan negara dalam perekonomian. Jatuhnya harga minyak menipiska cadangan devisa. Itu sudah berulang-ulang terjadi, sehingga pencabutan atau pengurangan subsidi sesungguhnya adalah salah satu unsur saja dari upaya besar untuk merombak perekonomian campur tangan (termasuk kerakyatan) menjadi perekonomian pasar bebas. Dalam konteks agenda neoliberal,

pada jalur yang berbeda dengan isu BBM, telah berlangsung pula berbagai rencana dan kegiatan berbagai aspek seperti penyusunan kebijakan dan UU yang mendorong terciptanya pasar bebas, upaya deregulasi, atau privatisasi. Tujuan akhirnya adalah kolonisasi atas negara dan kedaulatan negara. Kebijakan penghapusan subsidi BBM yang akibatnya naiknya harga BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan tersebut adalah bagian dari rencana besar kaum neoliberal yang sudah bekerja lebih dari 50 tahun, ditandai dengan berdirinya Bank Dunia, dan IMF pada tahun 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat. Sebagai pelengkap, kemudian menyusul dibentuk World Trade Organization. Dengan demikian, Bank Dunia, IMF, dan WTO merupakan motor penggerak neoliberalisme yang bertujuan mencengkeram ekonomi dunia dan melakukan penjajahan secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya, terutama di negara dunia ketiga.

Sebagaimana tujuan umum gerakan neoliberal adalah dominasi ekonomi terhadap negara-negara berkembang, maka tujuan pendirian lembaga-lembaga agen neoliberal seperti Bank Dunia dan IMF juga dapat ditafsirkan sebagai proses sistemis yang dilakukan negara-negara industri kaya untuk melembagakan dan mengubah pola relasi pusat-pinggiran dalam tatanan ekonomi dunia, dari pola bilateral menjadi multilateral. Di samping itu, dengan dikukuhnya dolar sebagai alat pembayaran internasional, diberikannya hak veto, dan penetapan kantor pusat Bank Dunia di Washington DC, maka dapat dikatakan Bank Dunia merupakan alat ekspansi dan hegemoni ekonomi Amerika Serikat ke seluruh dunia. Tampaknya,

kebijakan politik-ekonomi yang ditempuh pemerintah lebih bernuansa kepentingan dan mekanisme pasar berdasarkan anjuran-anjuran neoliberalisme (kapitalisme global), ketimbang berpihak sepenuhnya pada kepentingan sebagian rakyat yang hidup dalam kemiskinan sosial ekonomi.

Kelompok masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan terus mengalami kontradiksi struktural dan kesenjangan sosial. Mereka juga menderita karena kekerasan sistemik yang dipraktikkan pemerintah dalam bentuk sogokan dan kekerasan fisik. Upaya negara melakukan restrukturisasi perekonomian tak lebih dari upaya memfasilitasi peluang bisnis baru dan menguntungkan kelas kapitalis, ini dapat dilihat dari tiga sektor reformasi, yaitu investasi, privatisasi, dan deregulasi finansial, yang semuanya membebaskan pergerakan kapital berkaitan dengan kebijakan reformasi. Kenaikan harga BBM dengan alasan apapun mengindikasikan masih rentannya penerapan neoliberalisme di Indonesia.

Bagaimana kelanjutan dari neoliberalisme di Indonesia bisa diramalkan dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dibangun oleh Giroux (2004):

"Neoliberalism is not simply an economic policy designed to cut government regulations. It is also a political philosophy and ideology that effects every dimension of social life. Neoliberalism has heralded a radical economic, political, and experiential shift that now largely defines the citizen as a consumer, disbands the social contract in the interests of privatized considerations, and separates capital from the context of place. Under such

circumstances, neoliberalism portends the death of politics we know it, strips the social of its democratic values, and reconstructs agency in terms that are utterly privatized and provides the conditions for an emerging form of proto-fascism that must be resisted at all costs. Neoliberalism not only enshrines unbridled individualism, it also destroys any vestige of democratic society by undercutting its "moral, material, and regulatory moorings", and in doing so it offers no language for understanding how the future might be grasped outside of the narrow logic of the market. But there is even more at stake here than the obliteration of public concern, the death of the social, the emergence of a market-based fundamentalism that undercuts the ability of people to understand how to translate the privately experienced misery into collective action, and the elimination of the gains of the welfare state. There is also the growing threat of displacing "political sovereignty with the sovereignty of the market, as if the latter has mind and morality of its own". As democracy becomes a burden under the reign of neoliberalism, civic discourse disappears and the reign of unfettered social Darwinism with its survival-of-the-fittest philosophy emerges as the template for a new form of proto-fascism".

Pada akhirnya Fred Jameson menyinalir: "sesungguhnya lebih mudah untuk membayangkan tujuan dunia ini ketimbang membayangkan tujuan akhir dari kapitalisme neoliberal". (Henry A. Giroux, 2004). Di bawah neoliberalisme segalanya dan di mana pun adanya yang utama adalah menjual apa pun untuk keuntungan maksimal, bukan pada "the greatest happiness of the greatest number".

Daftar Pustaka

- Hiariej, Erij,. *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru* (Yogyakarta: IRE Presss, 2005).
- Hill, Hl,. *The Indonesian Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- Kunio, Yoshihara,. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Keynes, JM,. *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (London: A Harvest, 1953).
- Stiglitz, Joseph,. *The Economic Role of The State* (Cambridge: Basil Blackwell, 1989).

Jurnal:

- Sjahrir,. *Privatisasi Menuju Efisiensi. Jurnal Prisma*, No.7 (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Laporan Bank Dunia. 1990 dan 2000

Web Site Internet:

- Giroux, Henry A. Paper August 2004. *Neoliberalism and the Demise of Democracy: Resurrecting Hope in Dark Times* (www.dissidentvoice.org)

P embangunan, industrialisasi dan kegiatan eksploitasi migas di suatu pun, tak terkecuali di wilayah Papua Jawa Timur sesungguhnya telah menimbulkan sejumlah dilema. Di satu sisi industrialisasi dan eksploitasi migas diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan alternatif untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan. Tetapi, di sisi yang lain industrialisasi dan investasi berbagai bentuk komoditas di sektor pertambangan migas ternyata tak jarang malah melahirkan proses marginalisasi, kerusakan ekologis dan tidak berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya kaum perempuan yang seringkali memang menjadi korban

pertama dari proses perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Berbagai kajian telah banyak membuktikan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di sebuah wilayah, terlebih di wilayah perdesaan seringkali mengancam posisi dan bahkan merubah total peran perempuan, baik peran produktif maupun peran reproduktif yang selama ini mereka keahungkan. Ketika industrialisasi mulai masuk berakibat semua pranata sosial yang menyertainya, maka dapat dipastikan sejumlah perempuan niscaya akan kehilangan wilayah kelolanya, dan bahkan bukan tidak mungkin akan memantikan peran produktif perempuan. Padahal, kekuatan manusia akan alat reproduksinya yang merupakan